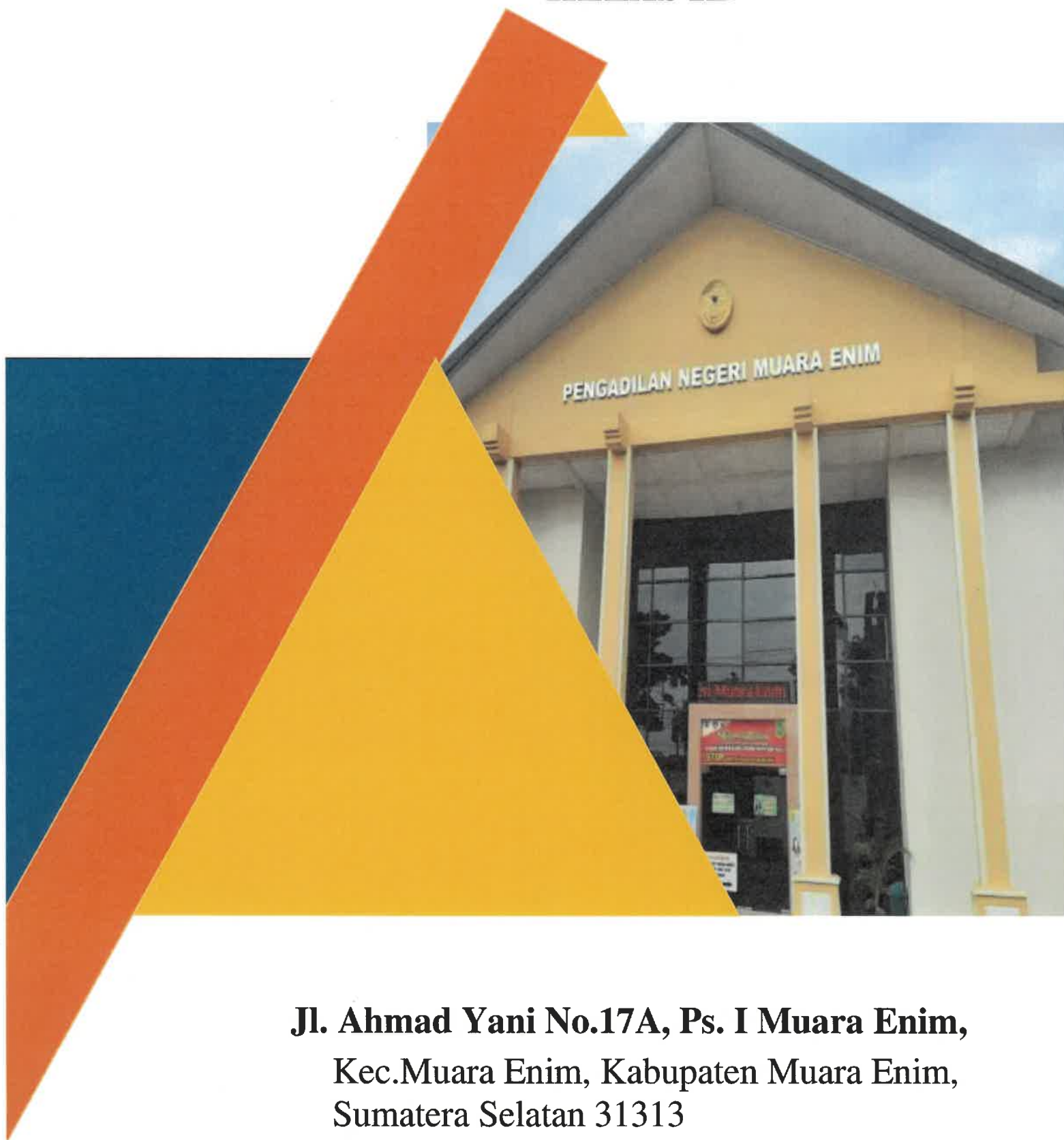




LAPORAN SURVEI PERSEPSI ANTI KORUPSI TRIWULAN II TAHUN 2026

**PENGADILAN NEGERI MUARA ENIM
KELAS IB**



**Jl. Ahmad Yani No.17A, Ps. I Muara Enim,
Kec.Muara Enim, Kabupaten Muara Enim,
Sumatera Selatan 31313**

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR	vi
BAB 1 KUESIONER SURVEI	
A. Penyiapan Bahan Survey	1
BAB II METODOLOGI SURVEI	
A. Kriteria Responden	5
B. Metode Pencacahan	5
C. Metode Pengolahan data dan Analisis	5
BAB III PENGOLAHAN SURVEI	
A. Analisis Hasil Survei.....	7
BAB IV DATA SURVEI	
A. Data/Profil Responden	17
B. Data Dukung Lainnya	20

DAFTAR TABEL

	Halaman
1. Unsur Survey Persepsi Korupsi	1
2. Bentuk Jawaban	2
3. Bobot Induk Survey Persepsi Anti Korupsi.....	4
4. Unsur Tindak Diskriminasi.....	7
5. Unsur Indikasi Kecurangan Pelayanan	8
6. Imbalan Diluar Ketentuan Berlaku	10
7. Unsur Praktik Pungutan Liar	11
8. Unsur Praktik Pencaloan.....	13
9. Hasil Survei Persepsi Anti Korupsi	14
10. Rencana Tindak Lanjut Survei Persepsi Anti Korupsi	16
11. Tingkat Pendidikan Responden	17
12. Pekerjaan Responden.....	17
13. Data Umur Responden.....	18
14. Jenis Kelamin.....	18
15. Domisili Responden.....	19
16. Data Layanan	19

DAFTAR GAMBAR

Halaman

1. Unsur Tindak Diskriminasi	8
2. Unsur Indikasi Kecurangan Pelayanan	9
3. Imbalan Diluar Ketentuan Berlaku	11
4. Unsur Praktik Pungutan Liar.....	12
5. Unsur Praktik Pencaloan.....	13

LEMBAR PENGESAHAN

LAPORAN SURVEI PERSEPSI ANTI KORUPSI TERHADAP PELAYANAN PADA PENGADILAN NEGERI MUARA ENIM KELAS IB TRIWULAN II TAHUN 2026



Disahkan di Muara Enim

Pada Hari Senin, 02 Juli 2026

Ketua Pengadilan Negeri Muara Enim



Ari Qurniawan, S.H., M.H.
NIP 19790711 200212 1 003

Ketua Tim Survei

A black ink signature of Rionaldo Fernandez Sihite, SH. MH. is written in a cursive script. The signature starts with a large 'R' and ends with a long horizontal stroke.

Rionaldo Fernandez Sihite, SH. MH.
NIP. 19921203 201712 1 006

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa Atas Rahmat dan Hidayahnya Laporan Survei Persepsi Anti Korupsi Pengadilan Negeri Muara Enim Triwulan II Periode 1 April 2026 s.d 30 Juni 2026 dalam rangka pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Pedoman Survei Persepsi Anti Korupsi terhadap penyalahgunaan Pelayanan Publik dapat diselesaikan dengan waktu yang telah ditentukan.

Survei Persepsi Kualitas Pelayanan bertujuan mendorong partisipasi masyarakat sebagai pengguna layanan dalam menilai kinerja Pengadilan Negeri Muara Enim Kelas IB dan mendorong Pengadilan Negeri Muara Enim Kelas IB untuk meringankan kualitas pelayanan public dengan mengedepankan prinsip transparan, partisipasi, akuntabel, berkesinambungan, keadilan dan netralitas kepada masyarakat penggunalayanan Pengadilan Negeri Muara Enim.

Semoga Laporan Survei ini bermanfaat untuk mengetahui kelemahan atau kekurangan dari masing-masing unsure dalam penyelenggaraan pelayanan public Pengadilan Negeri Muara Enim, agar segera memperbaiki pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan untuk meningkatkan kepercayaan public kepada pengadilan.

Muara Enim, 02 Juli 2026
Ketua Pengadilan Negeri Muara Enim Kelas IB,



Ari Qurniawan, S.H., M.H.
NIP-19790711 200212 1 003

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sejalan dengan pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani, Satuan Kerja pada pengadilan berkomitmen untuk terus menerus melakukan perbaikan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik.

Komitmen tersebut mengacu amanah Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-201 serta mengacu kepada Peraturan Menteri PAN & RB 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani Di Lingkungan Instansi Pemerintah. Salah satu wujud komitmen tersebut yaitu dengan disusunnya indeks persepsi anti korupsi yang menjadi salah satu parameter Pemerintahan yang bersih dan melayani. Pengadilan merupakan satuan kerja yang melaksanakan peran dan penyelenggaraan fungsi pelayanan strategis serta mengelola sumber daya yang cukup besar.

Pengadilan Negeri yang akan ditetapkan oleh Pengadilan Tinggi untuk menjadi lokasi *Pilot Project* menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani, perlu memperoleh masukan dari masyarakat menyangkut pelayanan di lingkungannya.

ZI menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani menitikberatkan pada Integritas penyelenggara dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Integritas Penyelenggara pelayanan publik akan dinilai diantaranya dapat dilihat dari potensi suap dan kemungkinan penambahan biaya diluar tarif resmi yang telah ditetapkan.

B. Maksud Dan Tujuan

Survei Persepsi Anti Korupsi Pengadilan Negeri Muara Enim Kelas IB bermaksud untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat sebaga pengguna layanan dan meningkatkan kualitas penyelenggara pelayanan publik. Adapun tujuan dari Survei Persepsi Anti Korupsi sebagai berikut:

1. Mendorong partisipasi masyarakat sebagai pengguna layanan dalam menilai kinerja penyelenggara layanan di Pengadilan Negeri Muara Enim Kelas IB
2. Mendorong penyelenggara pelayanan untuk meningkatkan kualitas pelayanan di Pengadilan Negeri Muara Enim Kelas IB
3. Mendorong Pengadilan Negeri Muara Enim Kelas IB untuk menjadi lebih inovatif dalam menyelenggarakan pelayanan publik
4. Mengukur kecenderungan tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik.

C. Prinsip

Dalam melaksanakan Survei Persepsi Anti Korupsi, dilakukan dengan memperhatikan prinsip:

1. **Transparan**
Hasil survei kepuasan masyarakat harus dipublikasikan dan mudah diakses oleh seluruh masyarakat.
2. **Partisipatif**
Dalam melaksanakan survei kepuasan masyarakat harus melibatkan pesertaserta masyarakat dan pihak terkait lainnya untuk mendapatkan hasil survei yang sebenarnya.
3. **Akuntabel**
Hal-hal yang diatur dalam survei kepuasan masyarakat harus dapat dilaksanakan dan dipertanggung jawabkan secara benar dan konsisten kepada pihak yang berkepentingan berdasarkan kaidah umum yang berlaku.
4. **Berkesinambungan**
Survei kepuasan masyarakat harus dilakukan secara berkala dan berkelanjutan untuk mengetahui perkembangan peningkatan kualitas pelayanan
5. **Keadilan**
Pelaksanaan survei kepuasan masyarakat harus menjangkau semua pengguna layanan tanpa membedakan status ekonomi, budaya, agama, golongan dan lokasi geografis serta perbedaan kapabilitas fisik dan mental.
6. **Netralitas**
Dalam melakukan survei kepuasan masyarakat, survei tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi, golongan dan tidak berpihak.

D. Ruang Lingkup

Ruang lingkup pedoman penyusunan Survei Persepsi Anti Korupsi meliputi metode survei, pelaksanaan dan teknis survei, langkah-langkah pengolahan data, pemantauan, evaluasi dan mekanisme pelaporan hasil penilaian indeks Survei Persepsi Anti Korupsi analisa hasil survei dan rencana tindak lanjut.

E. Unsur Survei Persepsi Anti Korupsi

Unsur Survei Persepsi Anti Korupsi Pengadilan Negeri Muara Enim Kelas IB Sebagai Berikut:

Tabel 1
Unsur Survei Persepsi Anti Korupsi

No	Unsur
1	Manipulasi Peraturan
2	Penyalahgunaan Jabatan
3	Menjual Pengaruh
4	Transparansi Biaya
5	Biaya Tambahan
6	Hadiah
7	Transparasi Pembayaran
8	Percaloan
9	Perbuatan Curang
10	Transaksi Rahasia

F. Bobot Indeks Persepsi Anti Korupsi

Bobot indeks Persepsi Anti Korupsi dari masing-masing nilai persepsi atas kinerja pelayanan Pada Pengadilan Negeri Muara Enim Kelas IB.

Tabel 2
Bobot Indeks Persepsi Anti Korupsi

Nilai Persepsi	Nilai Interval	Nilai Interval Konversi IPK	Mutu	Kinerja
1	1.00 – 1.75	25 - 43.75	D	Tidak bersih dari korupsi
2	1.76 – 62.50	43.76 – 62.50	C	Kurang bersih dari korupsi
3	2.51 – 3.25	62.51 – 81.25	B	Cukup bersih dari korupsi
4	3.26 – 4.00	81.26 – 100.00	A	Bersih dari korupsi

G. Manfaat

Dengan dilakukan Survei Persepsi Anti Korupsi diperoleh manfaat, antara lain:

1. Diketahui kelemahan atau kekurangan dari masing-masing unsur dalam penyelenggara pelayanan publik
2. Diketahui kinerja penyelenggara pelayanan yang telah dilaksanakan oleh unit pelayanan publik secara periodik.

3. Sebagai bahan penetapan kebijakan yang perlu diambil dan upaya tindak lanjut yang perlu dilakukan atas hasil survei kepuasan masyarakat.
4. Memacu persaingan positif antar unit penyelenggara pelayanan pada lingkup Pemerintahan Pusat dan Daerah dalam upaya peningkatan kinerja pelayanan
5. Bagi masyarakat dapat diketahui gambaran tentang kinerja unit pelayanan

H. Landasan Hukum

Dalam melaksanakan Survei Persepsi Anti Korupsi dilakukan dengan bersumber kepada:

- a. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- b. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo UU no 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- c. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
- d. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
- e. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI
- f. Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Bersih Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah.
- g. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1365/DJU/SK/HM.02.3/5/2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Survei dan Tata Cara Penggunaan Aplikasi Survei Pelayanan Elektronik (Sisuper) pada Direktorat Badan Peradilan Umum dan Peradilan di Bawahnya.

BAB II
PELAKSANAAN DAN TEKNIK SURVEI

A. Pelaksana Survei

Survei Kepuasan Masyarakat dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri Muara Enim Kelas IB.

B. Periode Survei

Survei periodik adalah survei yang dilakukan oleh penyelenggara pelayanan publik terhadap layanan publik yang diberikan kepada masyarakat. Survei dapat dilaksanakan secara tetap dengan jangka waktu (periodik) tertentu. Pada Pengadilan Negeri Muara Enim Survei Kepuasan Masyarakat dilakukan setiap 3 (tiga) bulanan (triwulan) atau 4 (empat) kali dalam 1 (satu) Tahun. Untuk Periode ini survei dilaksanakan pada Triwulan I Periode 01 Januari 2026 s.d 31 Maret 2026, sebagaimana Jadwal Tahunan Pelaksanaan Survei berikut ini

Tabel 3
Jadwal Tahunan Pelaksanaan Survei

N O	RENCIAN	JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DES	JAN
1	Pelaksanaan Survey Triwulan I													
2	Perhitungan Indeks, Pembuatan Laporan dan Publikasi Pelaksanaan Survey Triwulan I													
3	Monev dan Tindak Lanjut Survey Triwulan I													
4	Pelaksanaan Survey Triwulan II													
5	Perhitungan Indeks, Pembuatan Laporan dan Publikasi Pelaksanaan Survey Triwulan II													
6	Monev dan Tindak Lanjut Survey Triwulan II													

BAB III

PELAKSANAAN DAN TEKNIK SURVEI

A. Persiapan Survei

1. Penetapan Pelaksana

Pengadilan Negeri Muara Enim Kelas melaksanakan survei secara swakelola, dengan dibentuk Tim Penyusun Survei Persepsi Anti Korupsi yang terdiri dari:

- | | |
|--------------------------------|--|
| 1. Ketua | : Rionaldo Fernandez Sihite, S.H.,M.H. |
| 2. Analis dan Penyusun Laporan | : a. Harmen S.H.
b. Yurika Ariani S.T., M.M |
| 3. Surveyor | : Arman S.H |
| 4. Anggota | : a. Dory Hoswinda Sari, S.H.M.H
b. Alia Desnani, S.H.M.M
c. Kms. M. Amin S.H.,MM.
d. Finna Pastri Siregar S.H
e. Iwan Fajri, A.Md
f. M Juristianda Hadi Putra,S.H
g. M. Wendy Pranata, A.Md.Kom.
h. Rulita Widayanti, A.Md.T |

2. Penyiapan Bahan Survei

a. Kuisisioner

Daftar pertanyaan/kuisisioner sudah ditentukan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum melalui Aplikasi SISUPER sebagaimana dibawah ini:

- 1) Apakah pelayanan oleh petugas di Pengadilan sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku?
- 2) Apakah dalam memperoleh layanan Pengadilan secara cepat dan mudah ada penyalahgunaan jabatan dari petugas untuk meminta imbalan tertentu?
- 3) Pernahkah dihubungi oleh seseorang (karyawan Pengadilan) yang akan membantu dalam pengurusan surat/berkas perkara?
- 4) Apakah selalu mudah dalam mendapatkan informasi tentang biaya/tarif baik melalui website ataupun petugas layanan di Pengadilan?
- 5) Apakah di Pengadilan selalu membayar sesuai tarif resmi tanpa ada biaya tambahan

- 6) Apakah memberikan tanda terima kasih atas layanan yang diterima di Pengadilan (meskipun tidak diminta)?
- 7) Apakah menerima bukti transaksi keuangan/pembayaran yang sah setelah proses pembayaran di Pengadilan dilakukan?
- 8) Apakah pernah mengetahui ada praktek percaloan dalam pengurusan layanan di Pengadilan?
- 9) Apakah pernah melihat atau mendengar masih terjadi praktek KKN di Pengadilan?
- 10) Apakah pernah mengurus perkara melalui Hakim/Panitera/Staff Pengadilan diluar Persidangan?

b. Bentuk Jawaban

Desain bentuk jawaban dari setiap pertanyaan unsur pelayanan dalam kuisioner, berupa jawaban pertanyaan pilihan ganda. Bentuk pilihan jawaban kuisioner, bersifat kualitatif untuk mencerminkan tingkat kualitas pelayanan. Pembagian jawaban dibagi dalam beberapa kategori yaitu:

Tabel 4
Bentuk Jawaban

Nilai Persepsi 1	Nilai Persepsi 2	Nilai Persepsi 3	Nilai Persepsi 4
Selalu	Sering	Jarang	Tidak Ada
Tidak Sesuai Prosedur	Jarang Sesuai Prosedur	Sering Sesuai Prosedur	Selalu Sesuai Prosedur
Tidak Kompeten	Kurang Kompeten	Kompeten	Sangat Kompeten
Tidak Mudah	Kurang Mudah	Mudah	Sangat Mudah
Petugas Melayani Selalu Meminta Imbalan	Petugas Melayani Sering Meminta Imbalan	Petugas Melayani Jarang Meminta Imbalan	Petugas Melayani Tanpa Meminta Imbalan

B. Penetapan Jumlah Responden, Lokasi dan Waktu Pengumpulan Data

1. Penetapan Jumlah Responden

Teknik penarikan sampel dapat disesuaikan dengan jenis layanan, tujuan survei dan data yang ingin diperoleh. Responden dipilih secara acak yang ditentukan sesuai dengan cakupan wilayah masing-masing unit pelayanan. Sedangkan untuk besaran sampel dan populasi dapat menggunakan tabel sampel dari Krejcie and Morgan (Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan SURvei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik Lampiran II) atau

dihitung dengan menggunakan rumus:

$$S = \frac{\lambda^2 \cdot N \cdot P \cdot Q}{d^2 (N-1) + \lambda^2 \cdot P \cdot Q}$$

Dimana:

S=jumlah sampel

λ^2 =lambda(faktorpengali) dengan dk=1,taraf kesalahan bisa1%,5%, 10%

N =populasi P(populasi menyebar normal)=Q =0,5

d

2. Lokasi danWaktu Pengumpulan Data;

Lokasi Pengumpulan data di Kantor Pengadilan Negeri Muara Enim, waktu pengumpulan data pada jam pelayanan yaitu Tanggal 1 Januari 2026 s.d 31 Maret 2026 pada Hari Senin sampai dengan Jumat Pukul 09.00 s.d pukul 16.00 WIB.

3. Pelaksanaan Pengumpulan Data

a. Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang akurat dan objektif, perlu dijelaskan kepada masyarakat terhadap unsur-unsur pelayanan yang telah ditetapkan.

b. Pengisian Kuesioner

Pengisian kuesioner dilakukan sendiri oleh responden sebagai penerima layanan, pengecualian jika responden termasuk difabel maka dapat dibantu oleh surveyor seperti Petugas Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pengadilan Negeri Muara Enim

BAB IV

PENGUNAAN APLIKASI SURVEI

A. Penyiapan Aplikasi

Pengadilan Negeri Muara Enim Kelas IB selaku unit pelayanan publik telah menyiapkan 1 (satu) komputer atau media elektronik berupa komputer layar sentuh (touch screen) yang dapat digunakan untuk melaksanakan survei secara elektronik, petugas dari Meja Pelayanan Terpadu Satu Pintu akan membuka Aplikasi Survei Pelayanan Elektronik (SISUPER) pada komputer/media elektronik lainnya yang sudah disiapkan dengan tahapan:

1. Memastikan bahwa komputer yang digunakan untuk melaksanakan survei sudah terkoneksi dengan internet
2. Membuka browser/peramban halaman website
3. Membuka alamat website
[http://esurvey.badilum.mahkamahagung.go.id/index.php/pengadilan/\(098991\)](http://esurvey.badilum.mahkamahagung.go.id/index.php/pengadilan/(098991))
4. Jika berhasil membuka aplikasi maka akan tampil halaman Survei Persepsi Anti Korupsi dan Kepuasan Masyarakat

B. Pengisian Survei

Responden dapat memilih salah satu survei yang sudah disediakan oleh Pengadilan Negeri Muara Enim Kelas IB, terdapat beberapa tahapan antara lain:

- 1) Data Responden
Berupa isian data Pribadi Responden
- 2) Jenis Layanan
Berupa isian jenis layanan yang diterima oleh responden
- 3) Kuisisioner
Berupa pertanyaan yang sudah disiapkan dari Aplikasi SISUPER Dirjen Badilum
- 4) Kesan dan Pesan
Berupa isian bebas kesan dan pesan

BAB V
ANALISIS SURVEI PERSEPSI ANTI KORUPSI

A. Profil Responden

1. Tingkat Pendidikan Responden

Berdasarkan data dari Aplikasi Survei Pelayanan Elektronik (SISUPER) Dirjen Badilum, data tingkat Pendidikan responden pada Pengadilan Negeri Muara Enim Kelas IB Triwulan II Periode 1 April 2026 s.d 30 Juni 2026 sebagai berikut:

Tabel 5
Tingkat Pendidikan Responden

No	Pendidikan Terakhir	Frekuensi	Persentase %
1	Tidak Sekolah		
2	SD	3	6,3%
3	SMP	5	10,6%
4	SMA	25	53,2%
5	Diploma 1		
6	Diploma 2		
7	Diploma 3	2	4,2%
8	S1	11	23,4%
9	S2	1	2,1%
10	S3		
	Jumlah	47	100%

2. Pekerjaan Responden

Berdasarkan data dari Aplikasi Survei Pelayanan Elektronik (SISUPER) Dirjen Badilum, data tingkat Pendidikan responden pada Pengadilan Negeri Muara Enim Kelas IB Triwulan I Periode 1 Januari 2026 s.d 31 Maret 2026 sebagai berikut:

Tabel 6
Pekerjaan Responden

No	Pekerjaan Utama	Frekuensi	Persentase (%)
1	ASN	1	2,1%
2	TNI		
3	POLRI	3	6,3%
4	Swasta	2	4,2%
5	Wirausaha	1	2,1%
6	Tenaga Kontrak	2	4,2%

7	Lainnya	38	80,8%
	Jumlah	47	100%

3. Data Umur Responden

Berdasarkan data dari Aplikasi Survei Pelayanan Elektronik (SISUPER) Dirjen Badilum, data tingkat Pendidikan responden pada Pengadilan Negeri Muara Enim Kelas IB Triwulan I Periode 1 Januari 2026 s.d 31 Maret 2026 sebagai berikut:

Tabel 7
Data Umur Responden

No	Umur	Frekuensi	Persentase (%)
1	18-28 Tahun	10 Orang	21.2%
2	29-39 Tahun	17 Orang	36,2%
3	40-49 Tahun	13 Orang	27,5%
4	50-59 Tahun	7 Orang	14,8
5	60-69 Tahun		
6	Diatas 69 Tahun		
	Jumlah	47	100%

4. Jenis Kelamin

Berdasarkan data dari Aplikasi Survei Pelayanan Elektronik (SISUPER) Dirjen Badilum, data tingkat Pendidikan responden pada Pengadilan Negeri Muara Enim Kelas IB Triwulan I Periode 1 Januari 2026 s.d 31 Maret 2026 sebagai berikut:

Tabel 8
Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Frekuensi	Persentase %
1	Laki-Laki	19 Orang	40,4%
2	Perempuan	28 Orang	59,6%
	Jumlah	47	100%

5. Domisili Responden

Berdasarkan data dari Aplikasi Survei Pelayanan Elektronik (SISUPER) Dirjen Badilum, data tingkat Pendidikan responden pada Pengadilan Negeri Muara Enim Kelas IB Triwulan I Periode 1 Januari 2026 s.d 31 Maret 2026 sebagai berikut

Tabel 9
Domisili Responden

No	Domisili Responden	Frekuensi	Persentase %
1	Sumatera Selatan	41	87,2%

2	Sumatera Utara		
3	Riau	6	12,8%
4	Jawa Timur		
5	Banten		
6	Kalimantan Barat		
7	Sulawesi Selatan		
8	Papua		
	Jumlah	47	100

6. Data Layanan

Berdasarkan data dari Aplikasi Survei Pelayanan Elektronik (SISUPER) Dirjen Badilum, data tingkat Pendidikan responden pada Pengadilan Negeri Muara Enim Kelas IB Triwulan I Periode 1 Januari 2026 s.d 31 Maret 2026 sebagai berikut:

Tabel 10
Data Layanan

No	Jenis Layanan	Frekuensi	Persentase %
1	Pidana	34	72,3
2	Hukum/Informasi	12	25,5
3	Perdata	1	2,1
3	Umum		
Jumlah		47	100%

B. Nilai Unsur Survei Persepsi Anti Korupsi

Nilai unsur dari Survei Anti Korupsi Pengadilan Negeri Muara EnimKelas IB Sebagai Berikut:

1. Unsur Manipulasi Peraturan (U1)

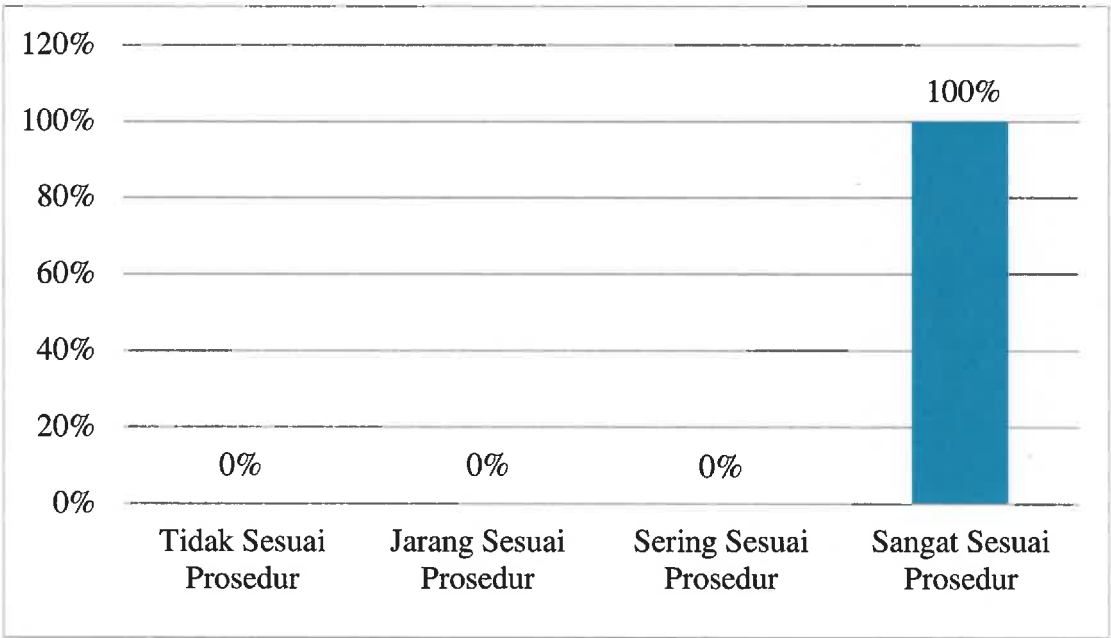
Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada Unsur Manipulasi Peraturan menunjukan hasil analisis perolehan 4.00 (100%) dari Jumlah responden memilih jawaban **“Selalu Sesuai Prosedur (A)”** pada nilai rata-rata sebesar **4.00** dimana berada pada nilai interval **3.26-4.00** dengan kategori **“Bersih dari Korupsi”**, indeks ini dapat diartikan bahwa kinerja satuan kerja pada Pengadilan Negeri Muara Enim Kelas IB **“Bersih dari Korupsi”**.

Tabel 11
Unsur Manipulasi Peraturan

Nilai Persepsi	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan	Frekuensi	Persentase (%)
1	D	Tidak Sesuai Prosedur	-	-
2	C	Jarang Sesuai Prosedur	-	-
3	B	Sering Sesuai Prosedur	-	-
4	A	Selalu Sesuai Prosedur	47	100
Jumlah			47	100

Berdasarkan Tabel Tersebut diatas, secara visual dapat disajikan dalam diagram berikut ini :

Gambar 1
Unsur Manipulasi Peraturan



2. Unsur Penyalahgunaan Jabatan (U2)

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada Unsur Penyalahgunaan Jabatan menunjukkan hasil analisis perolehan 4.00 (100%) dari Jumlah responden memilih jawaban **“Petugas Melayani Tanpa Meminta Imbalan (A)”** pada nilai rata-rata sebesar **4,00** dimana berada pada nilai interval **3.26-4.00** dengan kategori **“Bersih dari Korupsi”**, indeks ini dapat diartikan bahwa kinerja satuan kerja pada Pengadilan Negeri Muara Enim Kelas IB **“Bersih dari Korupsi”**

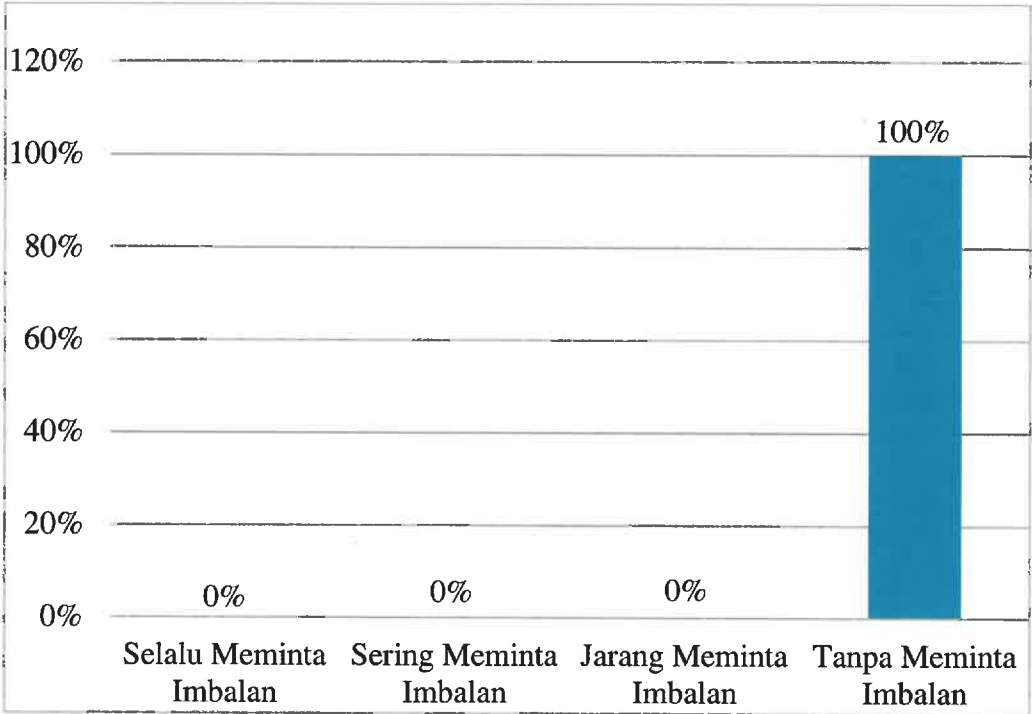
Tabel 12
Unsur Penyalahgunaan Jabatan

Nilai Persepsi	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan	Frekuensi	Persentase (%)
1	D	Petugas Melayani Selalu	-	-

		Meminta Imbalan		
2	C	Petugas Melayani Sering Meminta Imbalan	-	-
3	B	Petugas Melayani Jarang Meminta Imbalan	-	-
4	A	Petugas Melayani Tanpa Meminta Imbalan	47	100
Jumlah			47	100

Berdasarkan Tabel Tersebut diatas, secara visual dapat disajikan dalam diagram berikut ini :

Gambar 2
Unsur Penyalahgunaan Jabatan



3. Unsur Menjual Pengaruh (U3)

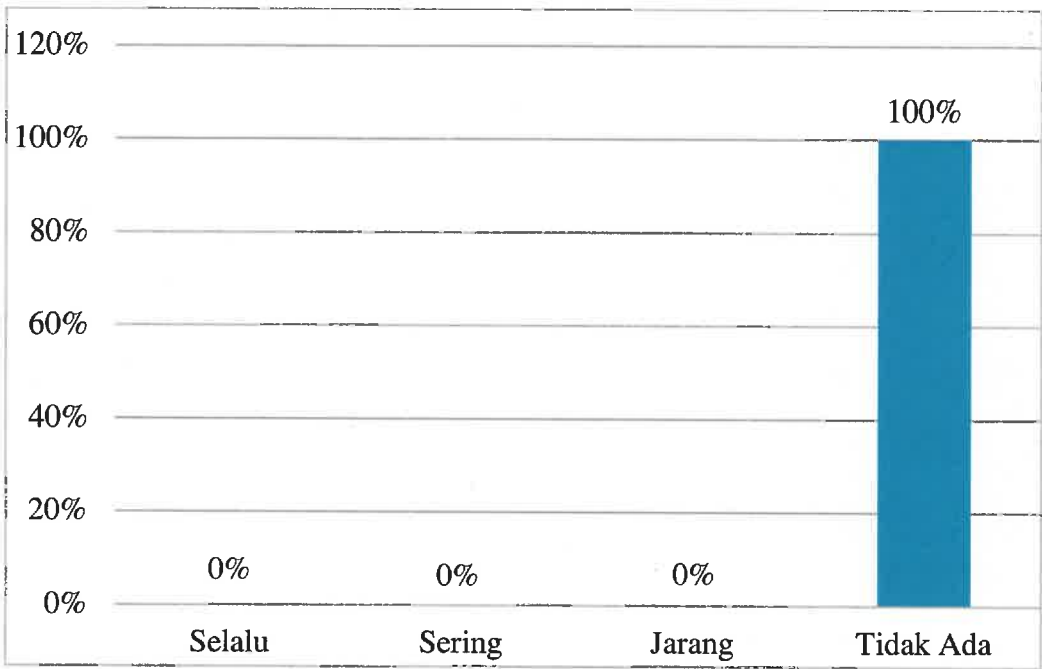
Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada Unsur Menjual Pengaruh menunjukan hasil analisis perolehan 4.00 (100%) dari Jumlah responden memilih jawaban **“Tidak Ada (A)”** pada nilai rata-rata sebesar **3,966** dimana berada pada nilai interval **3.26-4.00** dengan kategori **“Bersih dari Korupsi”**, indeks ini dapat diartikan bahwa kinerja satuan kerja pada Pengadilan Negeri Muara Enim Kelas IB **“Bersih dari Korupsi”**

Tabel 13
Unsur Menjual Pengaruh

Nilai Persepsi	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan	Frekuensi	Persentase (%)
1	D	Selalu	-	-
2	C	Sering	-	-
3	B	Jarang	-	-
4	A	Tidak Ada	47	100
Jumlah			47	100

Berdasarkan Tabel Tersebut diatas, secara visual dapat disajikan dalam diagram berikut ini:

Gambar 3
Unsur Menjual Pengaruh



4. Unsur Transparansi Biaya (U4)

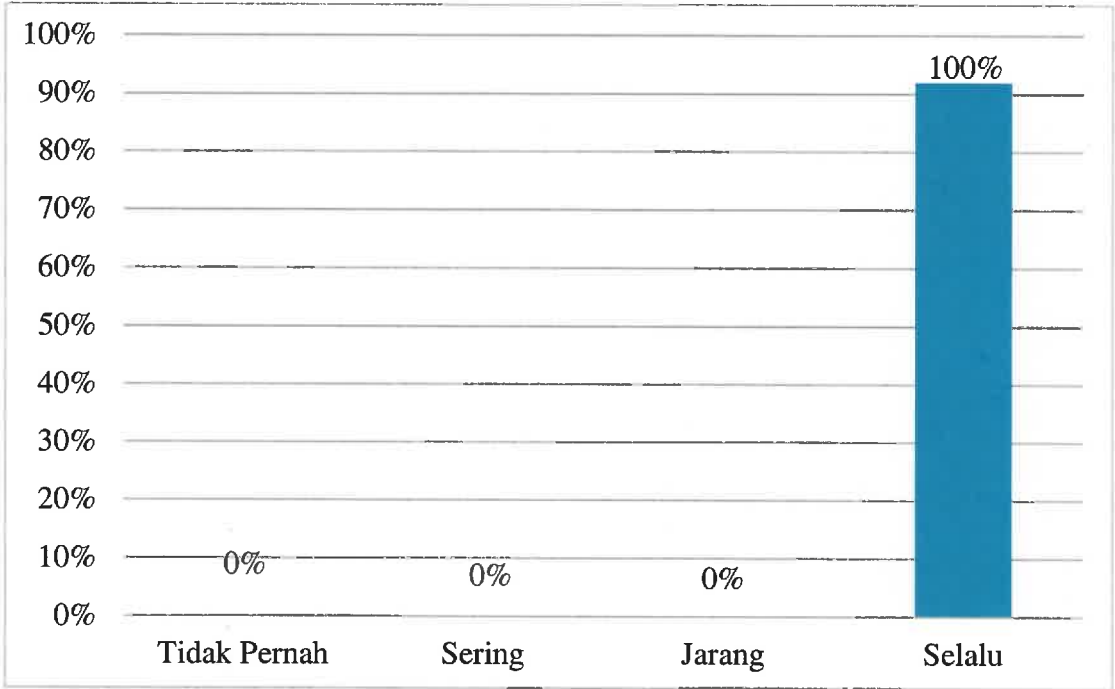
Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada Unsur Transparansi Biaya menunjukkan hasil analisis perolehan 4.00 (100%) dari Jumlah responden memilih jawaban **“Selalu (A)”** pada nilai rata-rata sebesar 3,983 dimana berada pada nilai interval **3.26-4.00** dengan kategori **“Bersih dari Korupsi”**, indeks ini dapat diartikan bahwa kinerja satuan kerja pada Pengadilan Negeri Muara Enim Kelas IB **“Bersih dari Korupsi”**.

Tabel 14
Unsur Transparansi Biaya

Nilai Persepsi	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan	Frekuensi	Persentase (%)
1	D	Tidak Pernah		
2	C	Jarang	-	-
3	B	Sering	-	-
4	A	Selalu	47	100
Jumlah			47	100

Berdasarkan Tabel Tersebut diatas, secara visual dapat disajikan dalam diagram berikut ini :

Gambar 4
Unsur Transaparansi Biaya



5. Unsur Biaya Tambahan (U5)

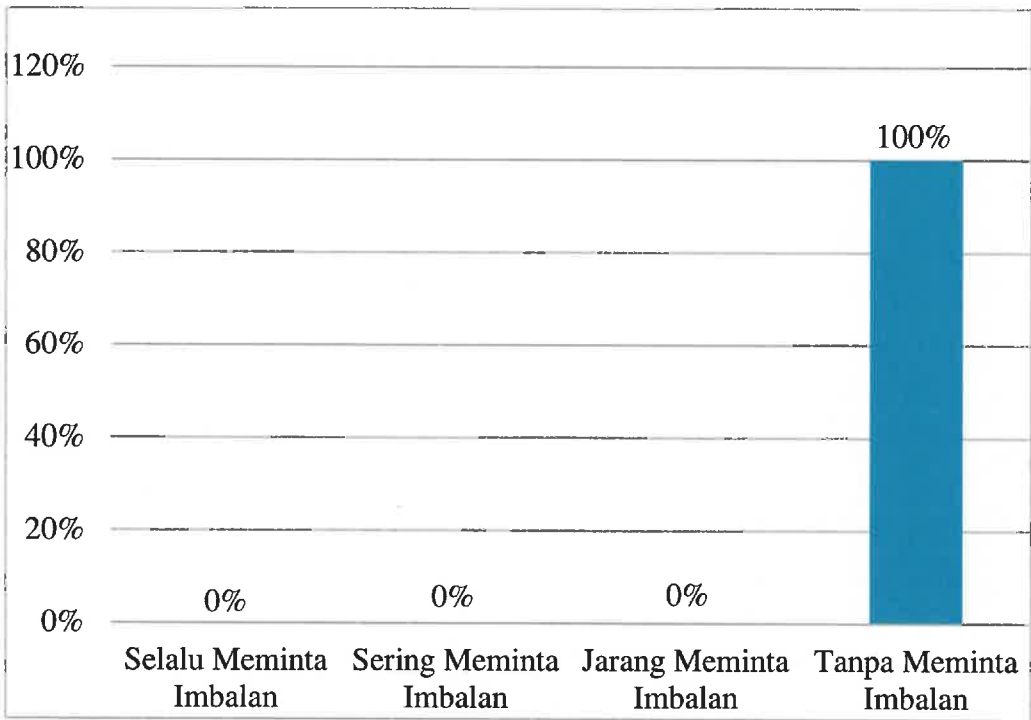
Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada Unsur Biaya Tambahan menunjukan hasil analisis perolehan 4.00 (100%) dari Jumlah responden memilih jawaban **“Selalu (A)”** pada nilai rata-rata sebesar **4.00** dimana berada pada nilai interval **3.26-4.00** dengan kategori **“Bersih dari Korupsi”**, indeks ini dapat diartikan bahwa kinerja satuan kerja pada Pengadilan Negeri Muara Enim Kelas IB **“Bersih dari Korupsi”**.

Tabel 15
Unsur Biaya Tambahan

Nilai Persepsi	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan	Frekuensi	Persentase (%)
1	D	Tidak Pernah	-	-
2	C	Jarang	-	-
3	B	Sering	-	-
4	A	Selalu	47	100
Jumlah			47	100

Berdasarkan Tabel Tersebut diatas, secara visual dapat disajikan dalam diagram berikut ini :

Gambar 5
Unsur Biaya Tambahan



6. Unsur Hadiah (U6)

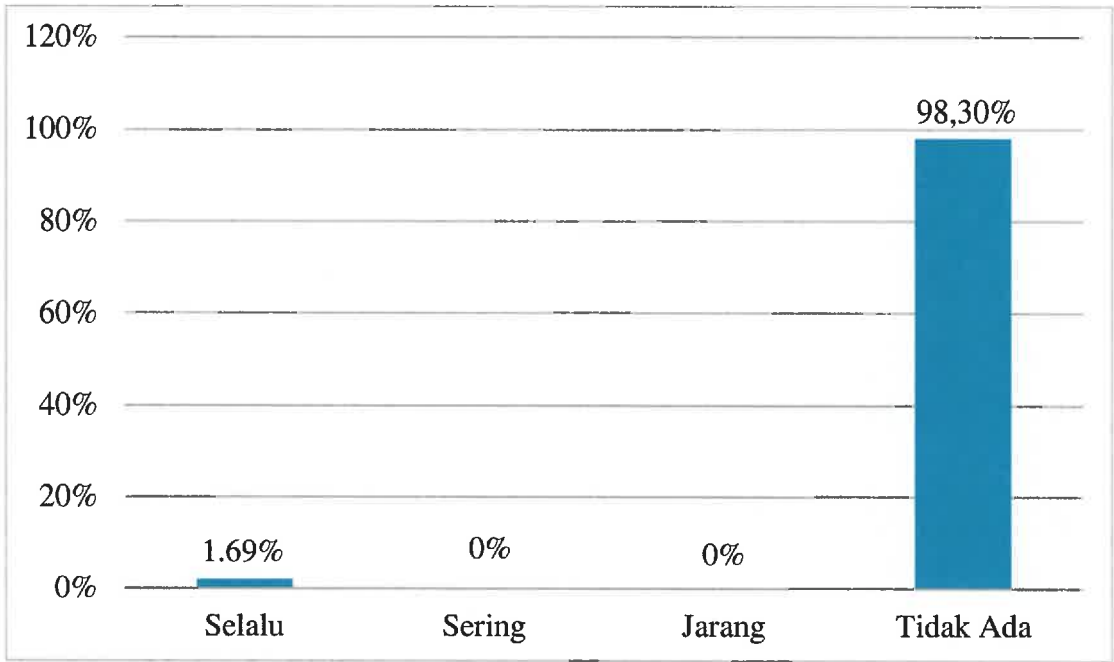
Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada Unsur Hadiah menunjukan hasil analisis perolehan 4.00 (100%) dari Jumlah responden memilih jawaban **“Tidak Ada (A)”** pada nilai rata-rata sebesar **3.949** dimana berada pada nilai interval **3.26-4.00** dengan kategori **“Bersih dari Korupsi”**, indeks ini dapat diartikan bahwa kinerja satuan kerja pada Pengadilan Negeri Muara Enim Kelas IB **“Bersih dari Korupsi”**

Tabel 16
Unsur Hadiah

Nilai Persepsi	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan	Frekuensi	Persentase (%)
1	D	Selalu	-	-
2	C	Sering	-	-
3	B	Jarang	-	-
4	A	Tidak Ada	47	100%
Jumlah			47	100

Berdasarkan Tabel Tersebut diatas, secara visual dapat disajikan dalam diagram berikut ini:

Gambar 6
Unsur Hadiah



7. Unsur Transparansi Pembayaran (U7)

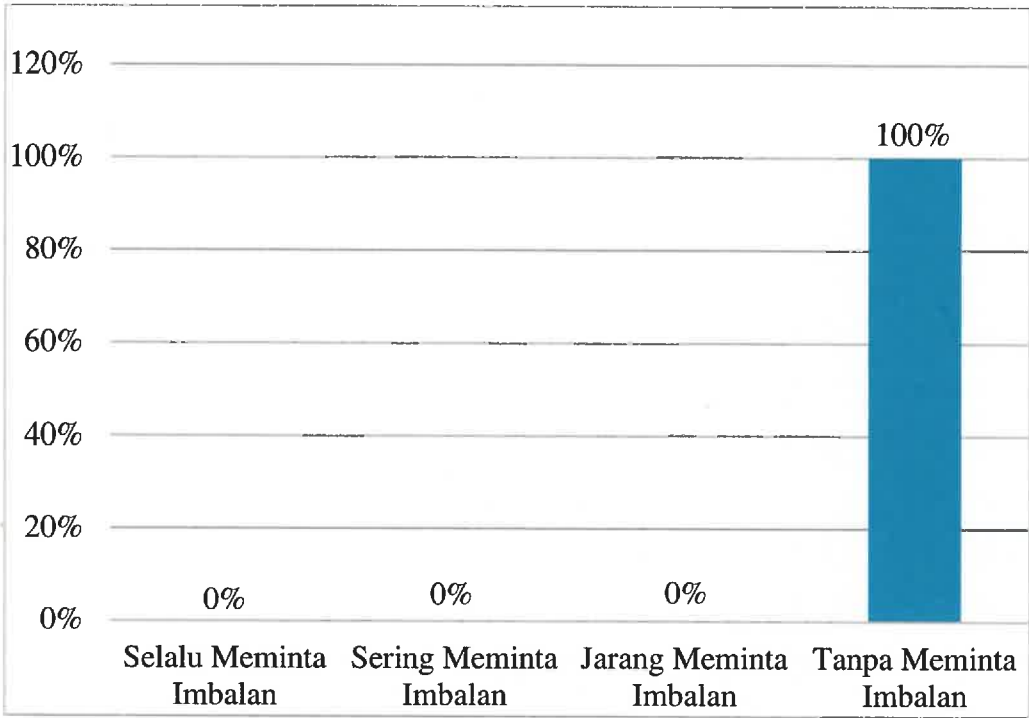
Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada Unsur Transparansi Pembayaran analisis perolehan 4.00 (100%) dari Jumlah responden memilih jawaban **“Selalu (A)”** pada nilai rata-rata sebesar **4,00** dimana berada pada nilai interval **3.26-4.00** dengan kategori **“Bersih dari Korupsi”**, indeks ini dapat diartikan bahwa kinerja satuan kerja pada Pengadilan Negeri Muara Enim Kelas IB **“Bersih dari Korupsi”**

Tabel 17
Unsur Transparansi Pembayaran

Nilai Persepsi	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan	Frekuensi	Persentase (%)
1	D	Tidak Pernah	-	-
2	C	Jarang	-	-
3	B	Sering	-	-
4	A	Selalu	47	100
Jumlah			47	100

Berdasarkan Tabel Tersebut diatas, secara visual dapat disajikan dalam diagram berikut ini :

Gambar 7
Unsur Transparansi Pembayaran



8. Unsur Pencaloan (U8)

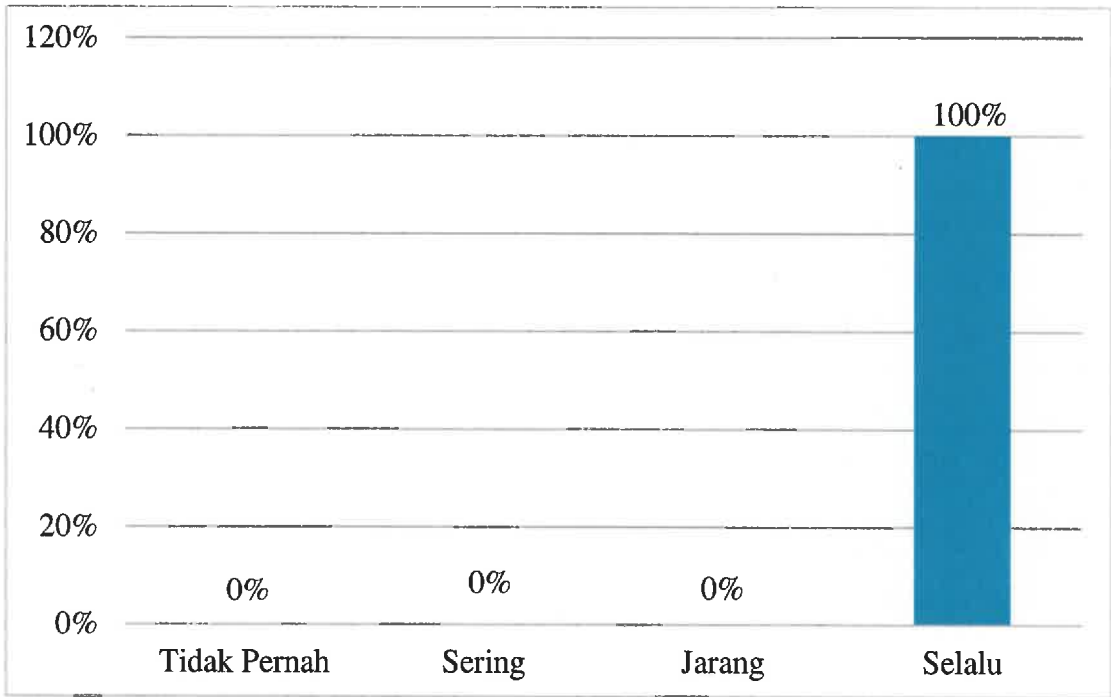
Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada Unsur Percaloan menunjukkan hasil analisis perolehan 4.00 (100%) dari Jumlah responden memilih jawaban **“Tidak Ada (A)”** pada nilai rata-rata sebesar **4,00** dimana berada pada nilai interval **3.26-4.00** dengan kategori **“Bersih dari Korupsi”**, indeks ini dapat diartikan bahwa kinerja satuan kerja pada Pengadilan Negeri Muara Enim Kelas IB **“Bersih dari Korupsi”**.

Tabel 18
Unsur Pencaloan

Nilai Persepsi	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan	Frekuensi	Persentase (%)
1	D	Selalu	-	-
2	C	Sering	-	-
3	B	Jarang	-	-
4	A	Tidak Ada	47	100
Jumlah			47	100

Berdasarkan Tabel Tersebut diatas, secara visual dapat disajikan dalam diagram berikut ini .

Gambar 8
Unsur Percaloan



9. Unsur Perbuatan Curang (U9)

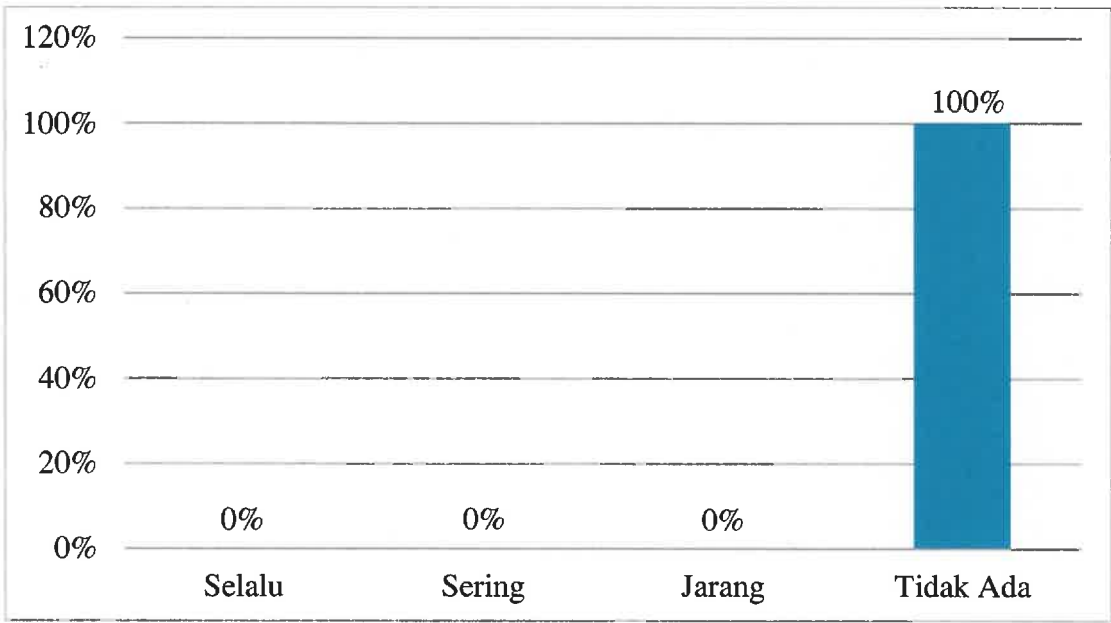
Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada Unsur Perbuatan Curang menunjukan hasil analisis perolehan 4.00 (100%) dari Jumlah responden memilih jawaban **“Tidak Ada (A)”** pada nilai rata-rata sebesar **4.00** dimana berada pada nilai interval **3.26-4.00** dengan kategori **“Bersih dari Korupsi”**, indeks ini dapat diartikan bahwa kinerja satuan jerja pada Pengadilan Negeri Muara Enim Kelas IB **“Bersih dari Korupsi”**

Tabel 19
Unsur Perbuatan Curang

Nilai Persepsi	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan	Frekuensi	Persentase (%)
1	D	Selalu	-	-
2	C	Sering	-	-
3	B	Jarang	-	-
4	A	Tidak Ada	47	100
Jumlah			47	100

Berdasarkan Tabel Tersebut diatas, secara visual dapat disajikan dalam diagram berikut ini :

Gambar 9
Unsur Perbuatan Curang



10. Unsur Transaksi Rahasia (U10)

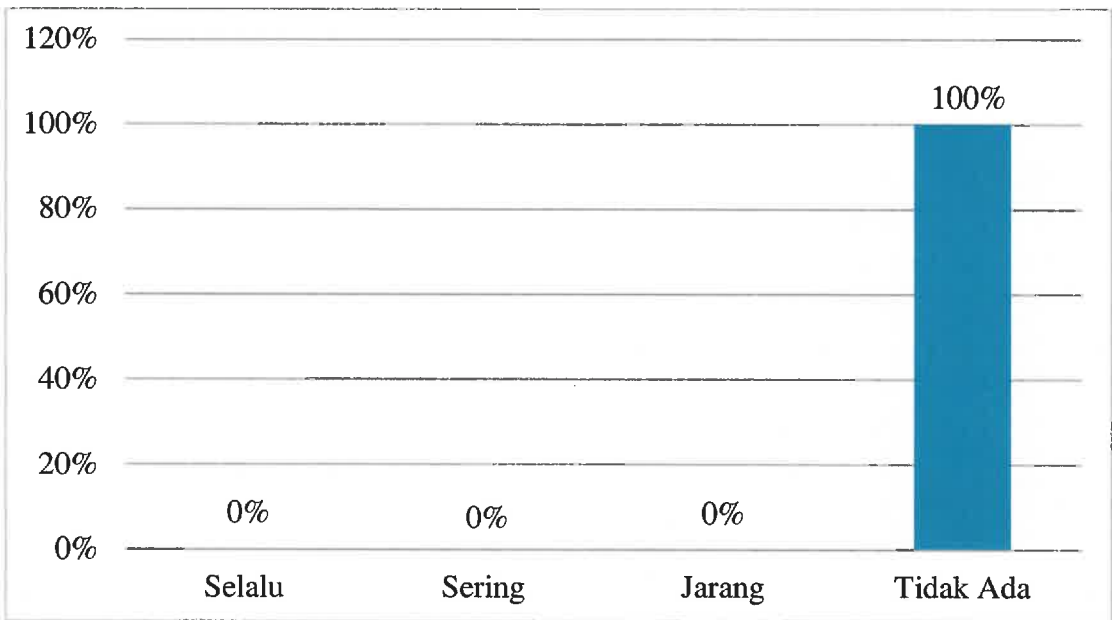
Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada Unsur Transaksi Rahasia menunjukkan hasil analisis perolehan 4.00 (100%) dari Jumlah responden memilih jawaban **“Tidak Ada (A)”** pada nilai rata-rata sebesar **4,00** dimana berada pada nilai interval **3.26-4.00** dengan kategori **“Bersih dari Korupsi”**, indeks ini dapat diartikan bahwa kinerja satuan kerja pada Pengadilan Negeri Muara Enim Kelas IB **“Bersih dari Korupsi”**.

Tabel 20
Unsur Transaksi Rahasia

Nilai Persepsi	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan	Frekuensi	Persentase (%)
1	D	Selalu	-	-
2	C	Sering	-	-
3	B	Jarang	-	-
4	A	Tidak Ada	47	100
Jumlah			47	100

Berdasarkan Tabel Tersebut diatas, secara visual dapat disajikan dalam diagram berikut ini :

Gambar 10
Unsur Transaksi Rahasia



C. Hasil Survei Persepsi Anti Korupsi Pengadilan Negeri Muara Enim

Berdasarkan hasil perhitungan Survei Anti Korupsi, jumlah nilai dari setiap unit pelayanan diperoleh dari jumlah dari nilai rata-rata setiap unsur pelayanan. Hasil nilai unit rata-rata dan peringkat pada setiap unsur dari Survei Persepsi Anti Korupsi terhadap pelayanan Pengadilan Negeri Muara Enim Kelas IB melalui Aplikasi SiSuper, sebagaimana tabel berikut:

Tabel 21

Hasil Survei Persepsi Anti Korupsi Pengadilan Negeri Muara Enim Kelas IB

No	Jenis Unsur	Jumlah	Nilai Rata-Rata	Nilai Rata-Rata Tertimbang	Peringkat
U1	Manipulasi Peraturan	188	4.000	0.400	
U2	Penyalahgunaan Jabatan	188	4.000	0.400	
U3	Menjual Pengaruh	188	4.000	0.400	
U4	Transparansi Biaya	188	4.000	0.400	
U5	Biaya Tambahan	188	4.000	0.400	
U6	Hadiah	188	4.000	0.400	
U7	Transparansi Pembayaran	188	4.000	0.400	
U8	Percaloan	188	4.000	0.400	
U9	Perbuatan Curang	188	4.000	0.400	
U10	Transaksi Rahasia	188	4.000	0.400	
Jumlah			4.000	0.400	
Nilai SPAK (%)			4.00		

Dengan demikian, nilai Survei Persepsi Anti Korupsi unit pelayanan hasilnya dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a. Nilai SPAK setelah dikonversi = Nilai Survei x Nilai Dasar
= 3.99 x 25 = 99.75
- b. Mutu Pelayanan A
- c. Kinerja Unit Pelayanan Pengadilan Negeri Muara Enim **Bersih dari Korupsi**

Nilai Indeks Persepsi Anti Korupsi 3.99 tersebut jika dikonversikan seperti dalam tabel bobot Indeks Persepsi Anti Korupsi maka nilai indeks tersebut masuk pada persepsi kinerja unit pelayanan Pengadilan Negeri Muara Enim “**Bersih dari Korupsi**” jika mengacu kepada Nilai Interval Indeks Persepsi Anti Korupsi antara **3.26 – 4.00** dengan Nilai Internal Konversi “**81.26–100.00**”

D. Nilai Terendah dan Tertinggi dari Survei Persepsi Anti Korupsi

Dalam peningkatan kualitas pelayanan, diprioritaskan pada 3 (tiga) unsur terendah harus dilakukan monitoring dan evaluasi untuk perbaikan dalam pelayanan Pengadilan Negeri Muara Enim Kelas IB ke depannya yang disertai dengan tindak lanjut terhadap monitoring dan evaluasi tersebut, sedangkan unsur yang mempunyai nilai cukup tinggi harus tetap dipertahankandalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Nilai 3 (tiga) unsur tertinggi dan 3 (tiga) unsur terendah dalam Persepsi Anti Korupsi Pengadilan Negeri Muara Enim Kelas IB Triwulan II Periode 1 April 2026 s.d 30 Juni 2026 sebagai berikut:

3 (tiga) Unsur Tertinggi Survei Persepsi Anti Korupsi
Triwulan II Periode 1 April 2026 s.d 30 Juni 2026

3

No	Unsur	Jumlah	Nilai Rata-Rata	Keterangan
1.	Penyalahgunaan Jabatan Apakah dalam memperoleh layanan Pengadilan secara cepat dan mudah ada penyalahgunaan jabatan dari petugas untuk meminta imbalan tertentu ?	188	4.00	U2
2	Percaloan Pernahkah dihubungi oleh seseorang (karyawan Pengadilan) yang akan membantu dalam pengurusan surat / berkas perkara ?	188	4.00	U3
3	Menjual Pengaruh Apakah selalu mudah dalam mendapatkan informasi tentang tarif/biaya baik melalui website ataupun petugas layanan di Pengadilan ??	236	4.00	U4

(tiga) Unsur Terendah Survei Persepsi Anti Korupsi
Triwulan II Periode 1 April 2026 s.d 30 Juni 2026

No	Unsur	Jumlah	Nilai Rata-Rata	Keterangan
1.	Apakah menerima bukti transaksi keuangan / pembayaran yang sah setelah proses pembayaran di Pengadilan dilakukan ?	188	4.00	U10
2	Apakah pernah mengetahui ada praktek percaloan dalam pengurusan layanan di Pengadilan ?	188	4.00	U9
3	Apakah pernah melihat dan atau mendengar masih terjadi praktek KKN di Pengadilan ?	188	4.00	U8

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data terhadap data penelitian ini, disimpulkan bahwa Indeks Persepsi Anti Korupsi di Pengadilan Negeri Muara Enim Kelas IB Triwulan II Periode **1 April s.d 30 Juni 2026** dengan nilai indeks sebesar **4.009/100%** dan berada pada Kinerja Mutu Pelayanan **Sangat Baik** atau **Bersih dari Korupsi**. Adapun Kesimpulan pada masing-masing ruang lingkup sebagai berikut:

1. Unsur Manipulasi Peraturan mendapat indeks “4.00”
2. Unsur Penyalahgunaan Jabatan mendapat indeks “4.00”
3. Unsur Menjual Pengaruh mendapat indeks “4.00”
4. Unsur Transparansi Biaya mendapat indeks “4.00”
5. Unsur Biaya Tambahan mendapat indeks “4.00”
6. Unsur Hadiah mendapat indeks “4.00”
7. Unsur Transparansi Pembayaran mendapat indeks “4.00”
8. Unsur Pencaloan mendapat indeks “4.00”
9. Unsur Perbuatan Curang mendapat indeks “4.00”
10. Unsur Transaksi Rahasia mendapat indeks “4.00”

B. Rekomendasi

Tim Penyusun Laporan Survei Persepsi Anti Korupsi memberikan rekomendasi atas Monitoring dan evaluasi terhadap 3 (tiga) nilai terendah kepada Pimpinan Pengadilan Negeri Muara Enim Kelas IB dan selanjutnya Pimpinan Pengadilan Negeri Muara Enim Kelas IB memberikan tindak lanjut atas rekomendasi dari monitoring dan evaluasi tersebut untuk perbaikan pelayanan Pengadilan Negeri Muara Enim Kelas IB.